

TESIS

**PERAN LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN
DAERAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP UPAYA
MEMPERKUAT *CHECKS AND BALANCES*
DI LEMBAGA LEGISLATIF**



JOHN SINARTHA WOLO
No. Mhs.: 135201994/PS/MIH



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2014**



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : JOHN SINARTHA WOLO
Nomor Mahasiswa : 135201994/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul Tesis : Peran Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dan Pengaruhnya terhadap Upaya Memperkuat *Checks and Balances* di Lembaga Legislatif

Nama Pembimbing	Tanggal	Tanda Tangan
Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.	11/11/2014	
Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.	11/11 - 2014	



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : JOHN SINARTHA WOLO
Nomor Mahasiswa : 135201994/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul Tesis : Peran Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dan Pengaruhnya terhadap Upaya Memperkuat *Checks and Balances* di Lembaga Legislatif

Nama Penguji	Tanggal	Tanda Tangan
Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum (Ketua)	4/12/2014	
Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M. (Anggota)	4/12-2014	
Y. Hartono, S.H., M. Hum (Anggota)	4-12-2014	

Ketua Program Studi

Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum
PROGRAM
PASCASARJANA

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : John Sinartha Wolo

No. Mhs : 135201994

Alamat : Jl. Indrapastha, Nomor 18 Pringgolayang, RT 02, RW 26,
Kelurahan Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini, dengan judul Peran Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dan Pengaruhnya terhadap Upaya Memperkuat *Checks and Balances* di Lembaga Legislatif merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan hasil plagiat dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (magister hukum), baik di Universitas Atma Jaya Yogyakarta maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian penulis sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali atas arahan dari Tim Dosen Pembimbing.
3. Seluruh informasi yang dimuat dalam Tesis ini yang berasal dari penulis lain telah diberikan penghargaan dengan menyebut nama pengarang, judul buku atau tulisan aslinya, dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 11 November 2014

Yang menyatakan

John Sinartha Wolo

ABSTRAKSI

Penelitian yang berjudul Peran Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dan Pengaruhnya terhadap Upaya Memperkuat *Checks and Balances* di Lembaga Legislatif ini difokuskan pada permasalahan antara lain: peran legislasi Dewan Perwakilan Daerah, kendala yang dihadapi dan solusi untuk mengatasi kendala tersebut dalam memperkuat *checks and balances* di lembaga legislatif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan pengaruhnya terhadap upaya memperkuat *checks and balances* di lembaga legislatif. Analisis terhadap peran legislasi Dewan Perwakilan Daerah juga bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Dewan Perwakilan Daerah dalam menjalankan peran legislasinya, dan mengupayakan solusi guna menyelesaikan kendala-kendala tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan perbandingan hukum, dan pendekatan politik hukum, serta mengkajinya dari perspektif teori demokrasi, teori *trias politica*, teori legislatif dan teori perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah melahirkan Dewan Perwakilan Daerah dan menjadi salah satu lembaga legislatif, selain Dewan Perwakilan Rakyat. (2) Kehadiran Dewan Perwakilan Daerah dirancang sebagai saluran aspirasi daerah sekaligus menjadi kamar penyeimbang (*checks and balances*) di lembaga legislatif. (3) Pasca kelahiran Dewan Perwakilan Daerah hingga Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU/2012, pengaturan tentang peran legislasi Dewan Perwakilan Daerah masih menunjukkan kesan sebagai lembaga bantu Dewan Perwakilan Rakyat, dan jauh dari tujuan dasar dihadirkannya Dewan Perwakilan Daerah di Negara Indonesia. Hal tersebut bertentangan dengan hakikat teori demokrasi, teori pembagian kekuasaan, teori legislatif dan teori perundang-undangan, yang pada dasarnya tidak berpihak pada dominasi suatu lembaga tertentu (tirani). Inferioritas peran legislasi Dewan Perwakilan Daerah menunjukkan praktik legislasi yang tidak lazim jika dibandingkan dengan negara-negara yang mengakomodasi hadirnya lembaga kedua di parlemen. Pengabaian terhadap peran legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam proses legislasi menunjukkan aspek pragmatis dari para pembuat undang-undang, jauh dari prinsip *checks and balances*.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti mengajukan beberapa saran utama sebagai berikut: diperlukan amandemen kelima terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 guna memperjelas pengaturan tentang peran legislasi Dewan Perwakilan Daerah mulai dari ranah Konstitusi, hingga pengaturan di bawahnya. Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memang tidak mudah dilaksanakan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi sebagai *the sole interpreter of constitution* atau *judicial interpretation*, dapat memberikan penafsiran yang jelas terhadap ranah peran legislasi Dewan Perwakilan Daerah. Praktik Konvensi yang melibatkan Dewan Perwakilan Daerah dalam proses legislasi juga merupakan solusi alternatif.

Kata Kunci : Peran Legislasi, Dewan Perwakilan Daerah, aspirasi daerah, *checks and balances*, Amandemen UUD 1945, *judicial interpretation* dan praktik konvensi.



ABSTRACT

Research titled “Legislation Function of Senate Republic of Indonesia and its effects to strengthen checks and balances system in Legislative Institution”, focused on legislation functions of Senate, the obstacles and its solution to resolve in order to strengthen checks and balances system in Legislative Institution.

This research aims to examine and analyze the legislation functions of Senate Republic of Indonesia and its effect to strengthen checks and balances system in Legislative Institution. The analyze concerning to the legislation function of Senate also aims to know the obstacles that found by Senate when Senate perform legislations function, and try to find the solving. This research is a normative research that uses legislations approach, historical approach, legal comparison approach, legal politics approach, by examining the theory of democratic, theory of trias politica, theory of legislative and theory of legislations.

Result of this research concludes that: (1) Amendments of the Constitutional of the Republic of Indonesia 1945 has thought out the Senate as one of the two legislatives institutions, besides Political Representative Council. (2) The presents of the Senate is planned as a channel of regional aspiration, and all at once as a revising chamber in legislative institution. (3) After Senate was born, until the decision of Constitution Court Number 92/PUU/2012, the regulations of Senate especially in the sector of legislation point us the Senate as an auxiliary of Political Representative Council. That’s fact are contradiction to the theory of democratic, theory of trias politica, theory of legislative and theory of legislations that basically avoid to the tyranny. The inferiority of legislation functions of Senate point out the different practices of another country that accommodate the second chamber in their parliament. The neglect to the legislation functions of Senate point out the pragmatic aspect of the legal maker, and not accommodates the principles of checks and balances.

Based on the conclusion, researcher suggests some ideas such as the fifth amendments of Constitutional of the Republic of Indonesia 1945 is needed to clarify the regulation about legislation functions of Senate, started by Constitution up to the under regulation. The amendment of Constitutional of the Republic of Indonesia 1945 is so difficult. So, as the the sole interpreter of constitution or as the judicial interpretation, Constitution Court of the Republic of Indonesia can offer clear interprete about the legislation functions of Senate. The practices of conventions that involve the Senate to the process of legislation are also alternative solution.

Keywords : Legislation functions, Senate, regional aspiration, checks and balances, amendment of the Constitution 1945, judicial interpretation, and the Constitutional practices.

KATA PENGANTAR

“Ada selalu berarti berada bersama dengan yang lain”
(Gabriel Marcel)

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kasih yang telah melimpahkan rahmat dan kasihnya kepada Penulis, sehingga penelitian yang berjudul **Peran Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dan Pengaruhnya terhadap Upaya Memperkuat *Checks and Balances* di Lembaga Legislatif** dapat diselesaikan. Penelitian dengan topik tersebut bermula ketika Penulis berinteraksi dengan sebagian masyarakat (dan bahkan Penulis sendiri) yang meski terlibat aktif memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah tiap perhelatan Pemilu tetapi merasa bingung, kurang pengetahuan tentang “apa itu sebenarnya Dewan Perwakilan Daerah?”

Penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Magister Humaniora pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Rampungnya penelitian ini tidak semata-mata merupakan usaha penulis secara personal, tetapi terlebih atas bantuan beberapa pihak yang dengan caranya yang khas dan tulus turut membantu Penulis. Penulis menyampaikan limpah terima kasih kepada:

1. Allah Tritunggal Yang Mahakudus yang senantiasa memberikan rahmat dan pancaran pencerahan kasih-Nya sehingga dapat menjiwai Penulis selama proses penelitian.
2. Keluarga besar, Ayahanda, Ibunda dan Kakak-kakak, yang telah memotivasi Penulis dalam merampungkan penelitian ini.
3. Pimpinan Universitas Atma Jaya Yogyakarta: Bapak Dr. R.Maryanto, M.A, selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Bapak Drs. M. Parnawa Putranta, M.B.A., Ph.D. selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Ibu Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M. Hum selaku dosen pembimbing utama yang dengan segala keikhlasannya, telah banyak meluangkan waktu dan pikiran memberikan bimbingan dan pencerahan kepada Penulis selama proses penelitian.
5. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M selaku dosen pembimbing anggota, telah banyak memberikan sumbangan pemikiran, bimbingan dan masukan yang sangat berharga.
6. Bapak Y. Hartono, S.H., M. Hum selaku dosen penguji anggota, telah memberikan masukan, memperkaya dan mempertajam pemahaman Penulis mengenai isi penelitian ini.
7. Para Narasumber: Bapak Ir. Abraham Paul Liyanto, Bapak Paulus Yohanes Sumino, Bapak B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum dan

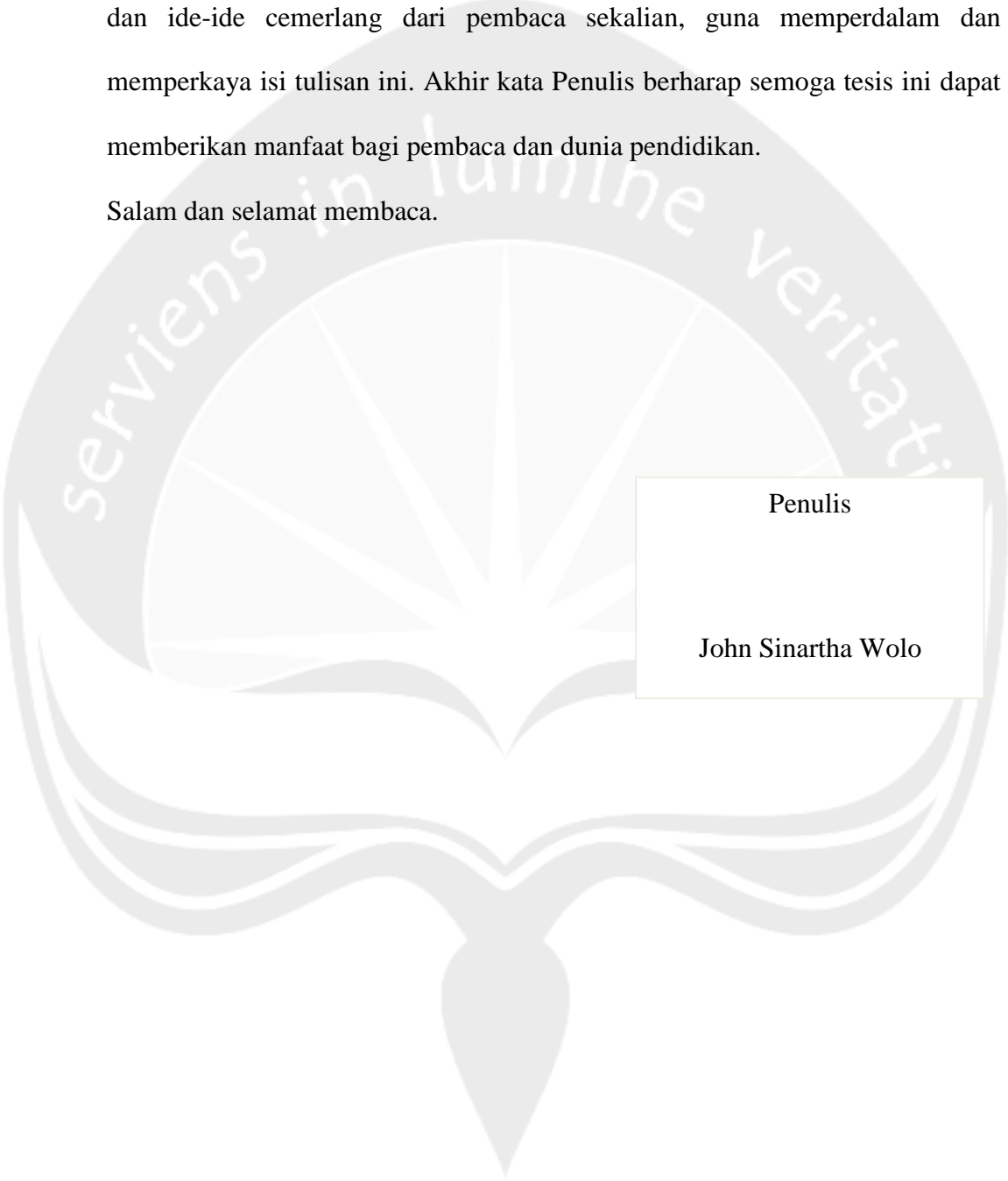
Bapak Dr. W. Riawan Tjandra S.H., M.Hum yang telah berbagi pengetahuan melalui pemikirannya yang tajam, sehingga memperkaya penelitian ini.

8. Pengelola Perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia – Yogyakarta, dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yang telah membantu Penulis mendapatkan jasa pustaka sehingga memperkaya sumber kepustakaan dalam penelitian ini.
9. Seluruh Dosen pada Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membentuk wawasan keilmuan di bidang hukum bagi Penulis selama mengikuti perkuliahan.
10. Rekan-rekan Mahasiswa Angkatan September 2013 Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendukung, menyemangati dan memberikan kontribusi yang berguna dalam penyelesaian penelitian ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah berkenan memberikan dukungan dan bantuan guna terselesainya penelitian ini.

Akhirnya, Penulis haturkan limpah terima kasih kepada segenap pembaca yang terkasih. Penulis menyadari bahwa tulisan ini belumlah

sempurna dan masih membutuhkan ide-ide cermat dan kritis untuk melengkapi dan membenahinya. Karena itu, Penulis sangat mengharapkan masukan kritis dan ide-ide cemerlang dari pembaca sekalian, guna memperdalam dan memperkaya isi tulisan ini. Akhir kata Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan dunia pendidikan.

Salam dan selamat membaca.



Penulis

John Sinartha Wolo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAKSI	v
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Batasan Masalah	15
D. Keaslian Penelitian	18
1. Tesis Pembeding I	18
2. Tesis Pembeding II	22
3. Tesis Pembeding III	24
E. Manfaat Penelitian	27
1. Manfaat Teoretis	28
2. Manfaat Praktis	28
a. Manfaat bagi Pemerintah	28

b. Manfaat bagi Masyarakat-----	28
F. Tujuan Penelitian -----	29
G. Landasan Teori-----	29
1. Teori Demokrasi -----	31
a. Gagasan Dasar Teori Demokrasi-----	31
b. Korelasi Teori Demokrasi dengan Penelitian ini -----	35
2. Teori <i>Trias Politica</i> -----	37
a. Gagasan Dasar Teori <i>Trias Politica</i> -----	37
b. Korelasi Teori <i>Trias Politica</i> dengan Penelitian ini-----	38
3. Teori Legislatif-----	40
a. Gagasan Dasar Teori Legislatif -----	40
b. Korelasi Teori Legislatif dengan Penelitian ini -----	43
4. Teori Perundang-Undangan -----	44
a. Gagasan Dasar Teori Perundang-Undangan-----	44
b. Korelasi Teori Perundang-Undangan dengan Penelitian ini -----	46
H. Sistematika Penulisan -----	48
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA -----	 50
A. Peran Legislasi Dewan Perwakilan Daerah -----	50
B. Upaya Memperkuat <i>Checks and Balances</i> -----	53
C. Lembaga Legislatif -----	57
 BAB III METODE PENELITIAN -----	 62
A. Jenis Penelitian -----	62
B. Pendekatan Penelitian -----	62
C. Data Penelitian-----	64
1. Sumber Data -----	64
a. Bahan Hukum Primer -----	64

b. Bahan Hukum Sekunder -----	66
2. Metode Pengumpulan Data -----	67
a. Studi Kepustakaan -----	67
b. Wawancara -----	67
D. Analisis Hukum -----	69
1. Analisis Data Bahan Hukum Primer -----	69
a. Deskripsi -----	69
b. Sistematisasi -----	69
c. Interpretasi Hukum -----	72
1) Interpretasi Gramatikal -----	72
2) Interpretasi Sistemik -----	72
3) Interpretasi Intensional -----	73
d. Menilai Hukum Positif -----	73
2. Analisis Bahan Hukum Sekunder-----	75
E. Proses Berpikir -----	76
BAB IV PERAN LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP UPAYA MEMPERKUAT <i>CHECKS AND BALANCES</i> DI LEMBAGA LEGISLATIF -----	77
A. Peran Legislasi Dewan Perwakilan Daerah -----	77
1. Tinjauan Umum tentang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia -----	77
2. Peran Legislasi Dewan Perwakilan Daerah -----	79
a. Peran Dewan Perwakilan Daerah dalam Penyusunan Program Legislasi Nasional dalam Perbandingan dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah -----	79
1) Peran Dewan Perwakilan Daerah dalam Penyusunan Prolegnas -----	80
2) Peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam Penyusunan Prolegnas -----	82
3) Peran Pemerintah dalam Penyusunan Prolegnas -----	85

b.	Peran Dewan Perwakilan Daerah dalam Pengajuan Rancangan Undang-Undang dalam Perbandingan dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden -----	86
1)	Peran Dewan Perwakilan Daerah dalam Pengajuan Rancangan Undang-Undang -----	86
2)	Peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pengajuan Rancangan Undang-Undang -----	89
3)	Peran Presiden dalam Pengajuan Rancangan Undang-Undang -----	91
c.	Peran Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang dalam Perbandingan dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden -----	93
1)	Peran Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang -----	93
2)	Peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang -----	95
3)	Peran Presiden dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang -----	99
d.	Peran Dewan Perwakilan Daerah dalam Penyebarluasan Program Legislasi Nasional dan Rancangan Undang-Undang dalam Perbandingan dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden ---	100
1)	Peran Dewan Perwakilan Daerah dalam Penyebarluasan Prolegnas -----	100
2)	Peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam Penyebarluasan Prolegnas -----	100
3)	Peran Presiden dalam Penyebarluasan Prolegnas -----	101
e.	Peran Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Perbandingan dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden -----	102
f.	Pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang Pajak, Pendidikan, dan Agama-----	103
3.	Peran Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012-----	105
a.	Peran Dewan Perwakilan Daerah dalam Penyusunan Program Legislasi Nasional -----	109
b.	Peran Dewan Perwakilan Daerah dalam Pengajuan Rancangan Undang-Undang -----	114
1)	Peran Dewan Perwakilan Daerah dalam Pengajuan Rancangan Undang-Undang -----	115

2)	Peran Dewan Perwakilan Daerah dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang -----	118
3)	Peran Dewan Perwakilan Daerah dalam Penyampaian Rancangan Undang-Undang -----	119
4)	Peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam Penyampaian Rancangan Undang-Undang -----	120
5)	Peran Presiden dalam Penyampaian Rancangan Undang-Undang -----	122
c.	Peran Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang -----	124
d.	Peran Dewan Perwakilan Daerah dalam Penarikan Rancangan Undang-Undang -----	128
e.	Peran Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) -----	129
f.	Peran Dewan Perwakilan Daerah dalam Penyebarluasan Program Legislasi Nasional dan Rancangan Undang-Undang -----	130
4.	Perbandingan Peran Legislasi Dewan Perwakilan Daerah di Beberapa Negara -----	130
a.	Amerika Serikat -----	130
b.	Perancis -----	134
B.	Kendala-kendala Peran Legislasi Dewan Perwakilan Daerah -----	136
1.	Peran Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dibatasi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 -----	136
a.	Ketidaktegasan Tafsiran terhadap Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 -----	136
b.	Peran Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Tahap Pembentukan Terganjil Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 -----	141
1)	Berkaitan dengan bidang tugas Peran Legislasi Dewan Perwakilan Daerah -----	141
2)	Berkaitan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 -----	142

2.	Peran Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dibatasi oleh Undang-Undang dan Pengaturan di Bawahnya -----	148
a.	Peran Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah -----	148
b.	Peran Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan -----	155
c.	Pengaturan Peran Legislasi Dewan Perwakilan Daerah yang Dibatasi dalam Pengaturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah dan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat -----	157
C.	Upaya Mengatasi Kendala-kendala dalam Peran Legislasi Dewan Perwakilan Daerah -----	159
1.	Memperkuat Peran Dewan Perwakilan Daerah dalam Pengaturan -----	161
a.	Memperkuat Peran Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 -----	162
1)	Mengakomodasi Jenis <i>Strong Bicameralism</i> -----	166
2)	Mengakomodasi Jenis <i>Likely Bikameralism</i> -----	168
3)	Rancang Ulang Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Rumah Bersama Seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Seluruh Anggota Dewan Perwakilan Daerah -----	172
b.	Memperkuat Peran Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan -----	174
c.	Memperkuat Peran Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah -----	178
d.	Memperkuat Peran Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Pengaturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah dan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat -----	182
2.	Memperkuat Peran Legislasi Dewan Perwakilan Daerah melalui Praktik Konvensi -----	184
3.	Memperkuat Dewan Perwakilan Daerah dengan Aksi ke Tengah Masyarakat -----	185

BAB V PENUTUP -----	187
A. Kesimpulan -----	187
B. Saran -----	194
DAFTAR PUSTAKA -----	199



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Bagan Penggunaan Landasan Teori.....	29
Tebel 2	Penyusunan Program Legislasi Nasional.....	109
Tebel 3	Pengajuan Rancangan Undang-undang	114
Tebel 4	Pembahasan Rancangan Undang-undang.....	124

